

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2010. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota "X" Tahun 2010.
- \_\_\_\_\_ 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota "X" Tahun 2011.
- \_\_\_\_\_ 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota "X" Tahun 2012.
- \_\_\_\_\_ 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota "X" Tahun 2013.
- \_\_\_\_\_ 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota "X" Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_ 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. Jakarta. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).
- Dewi, Hilda Gustriana. 2012. Analisis Hasil Audit BPK-RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga. Tesis Universitas Indonesia.
- Descopa, Vilentina. 2015. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Payakumbuh. Tesis. Universitas Andalas.
- Erizul, dan Febri Yuliani. 2014. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2014, hlm. 115-226.
- Handayani, Meity. 2013. Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap Untuk Meningkatkan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah. *Jurnal Bina Praja* Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013: 189.
- Halim, Abdul dan Abdullah Syukriy. 2005. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2 No.1, pp. 53-64.
- Ismayadi, Budi, dkk. 2014. "Materi Pelatihan Barang Milik Daerah Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah" Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Kolinung, Monika Sutri. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA* 818 Vol.3 No.1 Maret 2015.

- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Oktaviana, Sonya. 2009. Analisa Pelaporan Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. TESIS UI.
- Sahlan. 2015. Analisis Permasalahan Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Daerah. Tesis Universitas Dipenogoro.
- Sari, Vita Fitria. 2010. Studi Eksploratif Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian Menggunakan *Content Anaysis*. Tesis UNAND.
- Setiawan. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis Universitas Dipenogoro.
- Sholeh, Chabib dan Rochmansjah Heru, 2010 Pengelolaan Aset Tetap Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
- Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). FEB UNDIP Semarang.
- Sumini dan Oktavia Ester Pangaribuan. 2010 Modul Penatausahaan Barang Milik Daerah. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
- Terry, George dan Leslie W.Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Urusan Pemerintah Kota X.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Pasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Negara/Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Yusuf, M. 2010. Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Empat. Jakarta.

